

TEMUKAN BANYAK PERSOALAN DI WILAYAH

Diminati, Open House Solusi Sampaikan Permasalahan

YOGYA (KR) - Open house yang digelar setiap Rabu pagi di Balaikota Yogya semakin diminati. Ajang untuk bertemu secara langsung dengan Walikota Yogya Hasto Wardoyo tersebut menjadi solusi dalam mengutarakan setiap permasalahan yang dialami warga.

Pada pekan sebelumnya terdapat 16 entitas baik secara individu maupun kelompok yang antre bertemu Hasto. Sedangkan kemarin bertambah menjadi 20 entitas. Sebagian besar permasalahan yang diutarakan berkaitan dengan publik, namun tidak sedikit pula yang menyangkut pribadi. Beberapa permasalahan pribadi yang mendominasi berkaitan dengan beban pajak baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak restoran. "Saya berharap untuk permasalahan personal seperti pajak, bisa langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bagi yang keberatan, silakan ajukan permohonan ke sana. Nanti akan ada tim yang menghitung kemudian disampaikan ke saya. Saya juga sudah pesan ke BPKAD untuk

memproses setiap permohonan," ungkap Hasto.

Kendati demikian dirinya sudah memberikan atensi khusus mengenai besaran pajak yang memberatkan masyarakat. Terutama PBB yang beberapa tahun ini mengalami kenaikan seiring Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang turut meningkat. Hanya, diskresi mengenai besaran pajak secara umum juga tidak bisa diputuskan segera lantaran berkaitan regulasi yang sudah disahkan sebelumnya.

Hasto juga mengapresiasi minat masyarakat yang tinggi terhadap kebijakan open house. Dari kegiatan itu dirinya menemukan banyak persoalan di wilayah yang bahkan luput dari pengawasan aparat. Salah satunya yang diutarakan Ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Pemuda Mergangsan, Krisna Triwanto.



KR-Ardhi Wahdan

Jajaran pengurus Gapensi Kota Yogya menemui Walikota Yogya dalam ajang open house kemarin.

Ditemani dua rekannya, Krisna merasa resah atas maraknya penggunaan 'pil sapi' yang masuk kategori narkoba. Ia mendeteksi salah satu dokter di Yogya yang mudah mengeluarkan resep tersebut untuk menebusnya di apotek. Bahkan sempat dibeli menggunakan resep, pil tersebut lantas diperjualbelikan. Krisna pun berharap Pemkot ikut melakukan pengawasan agar generasi muda terselamatkan.

Selain penyalahgunaan narkoba, Krisna juga mengutarakan pembangunan di bantaran Kali Code di wilayahnya. Sebelumnya masyarakat di bantaran merelakan tempat ting-

gal untuk kepentingan penataan dengan konsep M3K atau Mundur Mungah Madheg Kali. Akan tetapi ada usaha sejenis kafe yang justru bangunannya menjorok ke sungai. Termasuk juga semakin maraknya usaha di Jalan Tamansiswa hingga menjadikan trotoar sebagai tempat parkir.

Persoalan di wilayah juga turut diutarakan salah satu warga di Kemantren Jetis. Masalah itu menyangkut kelompok Gandeng Gendong kuliner yang justru setiap pesanan tidak disampaikan ke anggota kelompok. Sebaliknya, ketua kelompok yang memegang akun membelanjakan sendiri setiap jamuan ke pasar, bukan

diproduksi oleh anggota kelompok. Padahal semangat Gandeng Gendong kuliner ialah peningkatan kesejahteraan anggota kelompok.

Persoalan lainnya juga diutarakan oleh Ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Yogya Aji Karnanto. Aji yang datang bersama unsur pengurus lainnya menyayangkan para pelaku lokal yang kurang diakomodir oleh kotanya sendiri. Banyak kegiatan lelang yang justru dimenangkan oleh pelaku dari luar daerah.

Atas berbagai persoalan tersebut, Hasto memastikan akan menindaklanjuti seluruh aduan. Terutama berkaitan layanan publik yang masih menjadi persoalan di wilayah. "Semua masukan sudah kami catat. Termasuk yang Gapensi itu coba nanti kita perjelas lagi dengan instansi terkait. Begitu juga yang masalah Gandeng Gendong tadi maupun narkoba. Itu semua masukan berharga bagi kami agar rekan-rekan mampu melakukan pengawasan lebih optimal. Justru saya berterima kasih jika ada yang memberi masukan terkait layanan publik," urainya. **(Dhi)-f**

Pemda DIY Raih WTP ke-15 Kali



KR-Istimewa

Penyerahan WTP dari BPK RI kepada DPRD DIY dan Pemda DIY.

YOGYA (KR) - Pemda DIY kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Setidaknya ini menjadi tahun ke-15 bagi Pemda DIY dalam meraih WTP Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tersebut diserahkan oleh BPK Negara V kepada Ketua DPRD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di DPRD DIY, Rabu (23/4).

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD DIY, Nuryadi dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Pencapaian ini menandai keberhasilan DIY dalam mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan," ujar Widhi dalam sambutannya.

Meskipun kembali meraih predikat tertinggi, BPK RI tetap menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam LHP tersebut, BPK menyoroti belanja hibah serta penyaluran dana bergulir melalui BUKP (Badan Usaha Kredit Produktif) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Widhi menegaskan, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah korektif guna menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPK. Ini demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. "Kami mendorong Pemda DIY untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. Rekomendasi BPK bukan sekadar catatan administratif, melainkan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan," tambahnya.

Penyerahan LHP DIY menjadi yang pertama kali dilakukan BPK RI terhadap LKPD pemerintah provinsi di tahun 2025. Ini menjadikannya sebagai indikator kesiapan dan kinerja pengelolaan keuangan DIY yang unggul dibanding daerah lain.

BPK RI juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian alokasi transfer ke daerah. Pemerintah daerah, bersama DPRD, dituntut lebih cermat, selektif, dan efisien dalam menyusun dan menyalurkan anggaran publik. **(Awh)-f**

Perempuan Penjaga Keseimbangan Kehidupan



KR-Riyana Ekawati

GKBRAA Paku Alam X saat bermain Angklung bersama para tamu undangan dalam Puncak Peringatan Hari Kartini.

YOGYA (KR) - Perempuan merupakan simbol kekuatan intelektual sekaligus penjaga keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya kepemimpinan perempuan masa kini, bukan hanya tentang eksistensi di ruang publik, tetapi tentang kemampuan meng-

hadirkan empati, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Untuk itu kepemimpinan perempuan harus menunjukkan wajah masa depan yang berakar pada empati dan kesadaran akan pentingnya harmoni sosial. "Peringatan Hari Kartini se-

kaligus menjadi seruan untuk mengubah paradigma lama, di mana perempuan sering kali diposisikan hanya sebagai objek pembangunan. Kini, saatnya menjadikan perempuan sebagai subjek utama perubahan, baik dalam kebijakan, pembangunan, maupun pengambilan keputusan publik," kata Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X pada Puncak Peringatan Hari Kartini Tahun 2025 di DIY di Bangsal Kepatihan, Rabu (23/4) yang dimeriahkan per-

tunjukan Tari Kawung dan angklung. Paku Alam X menekankan pentingnya keberimbangan peran perempuan di era modern melalui tema besar 'Pradnya Larasati: Keberimbangan Peran Perempuan di

Era Modern'. Dimana Pradnya berarti kecerdasan dan pengetahuan yang visioner. Larasati adalah harmoni yang disertai kesadaran dan kesetiaan pada nilai luhur.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi. Menurutnya, semangat Kartini tidak boleh berhenti pada aspek sejarah semata. Sebaiknya harus terus diuarakan dalam bentuk konkret, salah satunya dengan

memperkuat literasi perempuan. "Literasi itu penting. Kalau perempuan banyak membaca dan memahami persoalan dari informasi yang ada, maka mereka bisa ikut mencari solusi. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya," terang.

Erlina mengungkapkan, Kartini masa kini harus memiliki karakter kuat, tangguh, semangat, bijaksana, dan punya keberanian mengambil peran dalam berbagai lini. Baik dalam keluarga, masyarakat, karier, maupun organisasi. **(Ria)-f**

PENGURUS BARU FKPT DIY DILANTIK

Pencegahan Terorisme Libatkan Masyarakat

YOGYA (KR) - Pengurus baru Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY periode 2025-2027 resmi dilantik, Rabu (23/4). Ketua baru FKPT DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso SH didampingi Sekretaris Lilik Andi Aryanto SIP MM dan Bendahara Fahmy Akbar Idries SE MM.

Kepengurusan ini dilengkapi sejumlah kepala bidang (kabid) yakni Kabid Agama, Sosial dan Budaya Fatma Amalia SAG MSI, Kabid Media, Humas dan Hukum M Sobirin, Kabid Pemuda dan Pendidikan Djuli Sugiarto SSos MP, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ni'mah Afifah SAG MPD dan Kabid Pengkajian dan Penelitian Prof Dr Zuliy Qodir. Selain itu, terdapat tiga staf, yakni Staf Keuangan Monica Irene Donatirin SIP MPA, Staf Administrasi Refa'at Amany Amri SPsi dan Staf IT Dyah Woromukti SFil.



KR-Istimewa

Isnu Broto (no 2 dari kiri) bersama Ketua FKPT provinsi lain mengikuti pelantikan pengurus baru periode 2025-2027 oleh Kepala BNPT RI.

Pelantikan yang berlangsung di Hotel Vasaka di Jakarta itu dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT seluruh Indonesia. Pelantikan dipimpin Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono SIK MH.

Rakernas tahun ini mengusung tema 'Ikhlas Merajut Damai, Menggapai Indonesia

Emas', sebagai refleksi komitmen seluruh unsur FKPT dalam menguatkan sinergi pencegahan terorisme berbasis pelibatan masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air dan wujud semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme dan terorisme, yang terus berkembang secara global, regional, maupun lokal. **(Obi)-f**

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, melalui Jasa Pralelang PT. Solusindo Sinergi Lelang terhadap aset jaminan debitur Aman Sejahtera Computer CV, berupa:

Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri serta melekat di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 15108, Luas 241 M2, atas nama AMAN MAKMUR tanggal lahir 01/02/1977, terletak di Jalan Nusa Indah No. 55-C, Dusun Ndero, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama: LEO HARYO JAGAD WIJOYO
Harga Limit Rp. 875.000.000,00 dengan Uang Jaminan: Rp. 175.000.000,00

Waktu Pelaksanaan Lelang
Hari/Tanggal: Kamis, 15 Mei 2025
Waktu Penawaran: sejak diayatkan pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran: 15 Mei 2025, Pukul 09.30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain: lelang.go.id
Tempat/Pelaksanaan Lelang: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta
setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat Lelang:
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara terbuka (open bidding) menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan meremak serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file.jpg/png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Jaminan penawaran lelang:
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil), dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan.
5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang paling sebesar 2%, pembayaran BPHTB sesuai ketentuan dan harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
6. Pembeli dikenakan PPN sebesar 1,1% dari harga lelang (vide PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai) dan bukti setornya diserahkan kepada PT. Bank PANIN, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta.
7. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Informasi lebih lanjut tentang cara penawaran/persyaratan lelang, dapat menghubungi PT. Bank PANIN, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta, Jl. Gejayan CTX No. 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 541777 Ext. 229 atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta Tlp (0274) 544091.

Hari	Kamis
Tanggal	08 Mei 2025
Waktu Penawaran	Sesuai tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	08 Mei 2025 09:15 WIB sesuai waktu server
Alamat Domain	Penawaran melalui internet (Open Bidding) dengan mengakses url https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta
Penetapan Pemenang	setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2 % dari harga lelang

Yogyakarta, 24 April 2025
Ttd
SOLUSINDO SINERGI LELANG
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Panin, Tbk Kantor Cabang Utama Yogyakarta selaku Penjual, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (open bidding) melalui aplikasi lelang (lelang.go.id) terhadap obyek jaminan atas nama debitur sebagai berikut:

LEO HARYO JAGAD WIJOYO
Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1532 seluas 76 m2 (Tujuh Puluh Enam Meter Persegi), terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama: LEO HARYO JAGAD WIJOYO
Harga Limit Rp. 875.000.000,00 dengan Uang Jaminan: Rp. 175.000.000,00

Waktu Pelaksanaan Lelang
Hari/Tanggal: Kamis, 15 Mei 2025
Waktu Penawaran: sejak diayatkan pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran: 15 Mei 2025, Pukul 09.30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain: lelang.go.id
Tempat/Pelaksanaan Lelang: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta
setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat Lelang:
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara terbuka (open bidding) menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan meremak serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file.jpg/png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Jaminan penawaran lelang:
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil), dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan.
5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang paling sebesar 2%, pembayaran BPHTB sesuai ketentuan dan harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
6. Pembeli dikenakan PPN sebesar 1,1% dari harga lelang (vide PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai) dan bukti setornya diserahkan kepada PT. Bank PANIN, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta.
7. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Informasi lebih lanjut tentang cara penawaran/persyaratan lelang, dapat menghubungi PT. Bank PANIN, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta, Jl. Gejayan CTX No. 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 541777 Ext. 229 atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta Tlp (0274) 544091.

Yogyakarta, 24 April 2025
PT. Bank Panin, Tbk KCU Yogyakarta
Ttd;

PaninBank Branch Manager



Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta

SAAT kita mengenang sosok Raden Ajeng Kartini, yang terbayang bukan hanya seorang perempuan berkebang dengan pena di tangannya. Kartini menjadi lambang transformasi, penggugah kesadaran gender, dan pelopor pendidikan bagi perempuan di tengah

belunggu budaya patriarki yang kaku pada masa tersebut. Saat ini, lebih dari seratus tahun setelah surat-suratnya menggugah kesadaran rakyatnya, semangat Kartini tetap relevan, bahkan mendesak untuk terus disuarakan. Karena di zaman modern ini, perjuangan untuk kesetaraan gender bukanlah isu yang diabaikan. Kesetaraan gender telah menjadi elemen penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan inklusif. Kesetaraan gender tidak hanya sekadar frasa yang diungkapkan setiap 21 April. Kesetaraan gender merupakan kebutuhan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Masyarakat yang tidak memberikan kesempatan, akses, dan perlindungan hukum yang setara bagi perempuan dan laki-laki akan

menghadapi kesulitan dalam mencapai kemajuan yang adil. Bank Dunia, melalui laporan globalnya berjudul berjudul Women, Business and the Law 2024, mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi akan meningkatkan PDB nasional secara signifikan. Ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah sebuah tantangan, melainkan investasi strategis untuk masa depan negara. Kartini pada masa lalu menulis dalam batasan ruang dan waktu, tetapi gagasannya melebihi zaman yang ada. Hari ini, perempuan Indonesia telah mencapai banyak kemajuan. Mereka bertransformasi menjadi menteri, ilmuwan, pengusaha, pengajar, dan juga kepala daerah. Namun, apakah itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa perjuangan Kartini telah

berakhir? Sayangnya, jawabannya masih belum. Rintangannya masih meluas. Diskriminasi berdasarkan gender, kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan gaji, stereotip peran rumah tangga, serta minimnya representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih menjadi tantangan bersama. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang berbasis gender tetap tinggi setiap tahunnya, dan itu hanya merupakan permulaan dari masalah yang lebih rumit dan bersifat struktural. Isu-isu ini jangan hanya dianggap sebatas materi seremonial tahunan. Harus ada tindakan konkret, dimulai dari kebijakan publik yang mendukung gender, pendidikan yang setara, hingga perubahan budaya

yang menjadikan perempuan bukan sebagai "kelas dua", melainkan sebagai rekan setara dalam masyarakat. Pendidikan ialah faktor paling penting. Kita perlu mewarisi semangat Kartini yang menjadikan tulisan dan ide sebagai sarana perjuangan. Pendidikan harus dapat mengungkap nilai-nilai patriarkal yang masih melekat, bahkan di kalangan orang-orang terdidik. Kurikulum serta media perlu diarahkan untuk membangun sudut pandang yang setara gender sejak usia dini. Anak laki-laki dan perempuan perlu berkembang dengan kesadaran bahwa kemampuan serta potensi tidak ditentukan oleh gender. Di sektor publik, penguatan afirmasi terhadap keterlibatan perempuan harus senantiasa dilakukan. Tidak hanya cukup menetapkan kuota, tetapi juga penting

menciptakan suasana yang mendukung perempuan untuk berbicara, membuat keputusan, dan menunjukkan kepemimpinannya. Dalam lingkungan kerja, struktur gaji dan peluang karier juga perlu dijauhkan dari diskriminasi gender. Generasi muda saat ini memainkan peran penting. Mereka menjalani hidup di tengah gelombang informasi dan budaya digital yang membentuk nilai-nilai baru. Akan tetapi, tantangannya ialah bagaimana supaya mereka tidak terperangkap dalam konten yang malah meneguhkan stereotip dan misogini. Kita perlu literasi gender yang kokoh di media sosial supaya semangat Kartini terus hidup dengan cara yang adaptif dan sesuai konteks. Mewarisi Kartini berarti meneruskan perjuangannya

dengan metode yang sesuai di zaman sekarang. Tidak hanya dengan mengenakan kebaya atau menyelenggarakan lomba memasak, tetapi juga dengan melawan ketidakadilan yang masih membelenggu sebagian kaum perempuan di Indonesia. Semangat Kartini merupakan dorongan untuk berpikir secara kritis, memperjuangkan akses yang setara, serta menentang semua bentuk subordinasi yang berlandaskan gender. Saatnya kita menempatkan isu gender tidak di pinggiran, melainkan di pusat peradaban kita. Sebab sebuah bangsa yang besar tidak hanya menghormati jasa pahlawannya, melainkan juga mewujudkan impian mereka dalam aksi nyata.

